

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi yang berfungsi dengan baik bergantung pada berbagai elemen yang efektif untuk keberhasilannya. Salah satunya yaitu dalam hal pelaporan keuangan. Semua orang mengharapkan pemerintah daerah dapat memenuhi tuntutan masyarakat untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam kebijakan pemerintah daerah di dunia modern, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah (Nilamsari, dkk., 2021). Pemeriksaan atas LKPD bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran perjanjian laporan keuangan oleh pemerintah daerah. Opini WTP yang diberikan BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran. Setiap tahun, BPK (Badan Pengawas Keuangan) mengeluarkan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah guna membantu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang diserahkan, pada pemeriksaan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Tahun 2022 terhadap 37 pemerintah daerah Jawa Timur, 36 pemerintah daerah berhasil mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) menemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Meskipun demikian, permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian LKPD. Permasalahan tersebut diantaranya, masih terdapat pengelolaan pajak dan retribusi belum dilakukan secara tertib. Masih terdapat penyusunan anggaran dan realisasi belanja belum

sesuai ketentuan. Masih terdapat penatausahaan dan pencatatan aset tetap pada pemerintah daerah belum tertib.

Perwakilan BPK Jawa Timur bapak **Karyadi berpesan** “Meski memperoleh opini WTP, kami minta pemerintah daerah tetap serius menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK dalam LHP”. Karena Pasal 20 UU Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Mengamanatkan pejabat wajib menindak lanjuti rekomendasi LHP. Fenomena ini menjadikan alasan untuk melihat bagaimana pemerintah daerah mempertimbangkan berbagai faktor yang diduga memiliki pengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Menurut perspektif teori *stewardship* dimana pemerintah daerah sebagai *steward* yang dituntut untuk memberikan pelayanan bagi kepentingan masyarakat atau *principal*. Contohnya seperti pelaporan keuangan yang merupakan suatu produk dari kinerja pemerintah daerah untuk masyarakat.

Dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten Sidoarjo dipilih sebagai objek penelitian. Dengan alasan bahwa konsistensi Sidoarjo dalam mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama sembilan tahun berturut-turut hingga 2021. Opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan Sidoarjo dianggap wajar, transparan, dan sesuai standar, meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pengelolaan anggaran daerahnya. Selain itu, Sidoarjo juga menampilkan efisiensi dalam realisasi anggaran, yang hampir selalu mendekati target. Sistem pemantauan yang kuat memastikan bahwa realisasi belanja modal dan transfer daerah tetap efisien. Laporan realisasi anggarannya memberikan detail yang jelas tentang penggunaan kas dan aset

lancar, membantu pemerintah membuat keputusan yang lebih informatif dan meningkatkan akuntabilitas pada setiap tingkat pengeluaran.

Daerah lain yang masih perlu peningkatan dalam pengelolaan aset tetap, pengawasan, dan pelaporan, Sidoarjo telah mencatatkan sistem pengawasan keuangan yang lebih baik sehingga kinerjanya lebih terukur dan terstruktur. Upaya-upaya ini membantu Sidoarjo dalam mempertahankan kinerja keuangan yang lebih stabil dan andal di tingkat regional. Laporan keuangan yang berkualitas baik menunjukkan bahwa informasi yang terkandung di dalamnya dapat digunakan dalam pengambilan keputusan (Firmansyah, dkk., 2022). Penelitian terdahulu memaparkan 3 (tiga) variabel yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, yaitu kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal (Ridzal, dkk., 2022). Dalam penelitian tersebut menunjukkan ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Sumber daya manusia merupakan individu yang mau, siap dan mampu berkontribusi dengan bentuk sumbangan dalam suatu usaha untuk pencapaian tujuan organisasional (Asih & Pratiwi, 2021). Sedangkan, kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia mencakup keterampilan, pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang sesuai untuk memungkinkan suatu individu melakukan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif (Pratama & Anandita, 2021). Pemaparan tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia (Ridzal, dkk., 2022). Didukung oleh pernyataan dari studi lain yang juga menyatakan hal yang serupa, bahwa

kapasitas sumber daya manusia memiliki pengaruh yang positif terhadap kualitas Laporan keuangan pemerintah desa (Widayati & Abdurahim, 2022).

Pernyataan tersebut di atas berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah (Zumaira & Rahmawaty, 2022). Menurut penelitian tersebut, saat ini sumber daya manusia di divisi pengelolaan keuangan pemerintah daerah belum memadai untuk mengatur pembuatan laporan keuangan yang memenuhi persyaratan akuntansi. Penelitian lain juga menyatakan hal yang serupa, Kapasitas sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh/dampak yang signifikan terhadap kualitas Laporan keuangan, karena personil sumber daya manusia yang membuat laporan keuangan tidak memiliki riwayat pendidikan jurusan akuntansi (Asih & Pratiwi, 2021).

Sumber daya manusia dituntut untuk menguasai teknologi informasi demi tercapainya tujuan organisasi (Sa'adah & Nasrullah, 2021). Khususnya para akuntan yang mengikuti perkembangan teknologi informasi, pada aplikasi akuntansi yang begitu mudah digunakan untuk membantu penggunaanya dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas dan efektif (Lestari & Ardini, 2022). Dengan memanfaatkan teknologi, diharapkan informasi keuangan menjadi berkualitas, yaitu akurat, tepat waktu, dan relevan (Hombing, dkk., 2020). Hal tersebut selaras dengan studi yang menyatakan pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh terhadap kapasitas laporan keuangan pemerintah daerah (Ridzal, dkk., 2022). Hasil penelitian tersebut juga diperkuat oleh hasil dari penelitian lain yang membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah (Zumaira & Rahmawaty, 2022).

Dalam penelitian lain menyatakan sebaliknya, bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Khoirunisa & Khoiriawati, 2022). Pemanfaatan teknologi informasi tidak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga mungkin terdapat faktor lain yang memengaruhi kualitas laporan keuangan. Penelitian tersebut diperkuat dengan pernyataan dari penelitian lain, bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut dikarenakan banyaknya koperasi yang belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi, transaksi yang terkomputerisasi dan minimnya unit komputer yang dimiliki untuk membantu dalam proses penyusunan laporan keuangan menjadi buktinya (Ismunawan & Septyani, 2020).

Untuk sistem pengendalian internal menurut penelitian terdahulu berpengaruh pada kualitas laporan keuangan (Ridzal, dkk., 2022). sistem pengendalian internal bisa diartikan sebagai suatu cara pengawasan kinerja sumber daya manusia suatu organisasi yang berperan penting dalam mendeteksi dan mencegah adanya kecurangan (*fraud*) (Henny, dkk., 2021). Adanya sistem pengendalian internal yang memadai menjadikan akuntan perusahaan mampu menyediakan informasi keuangan untuk setiap *stakeholder* yang nantinya akan menjadi dasar dari pengambilan keputusan ekonomi (Manalu & Novita, 2022). Struktur sistem pengendalian internal yang baik akan menghasilkan kinerja yang baik dalam suatu instansi. hal tersebut akan tercermin melalui kualitas laporan keuangan yang disajikan. Laporan keuangan tersebut mampu menyampaikan informasi yang akurat dan relevan mengenai posisi dan kinerja keuangan berguna bagi para pengguna laporan keuangan sebagai dasar untuk membuat keputusan.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap kapasitas laporan keuangan pemerintah daerah (Ridzal, dkk., 2022). Hasil studi lain menyatakan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah (Artiwi & Kresnandra, 2023). Namun, penelitian lain justru menunjukkan hasil sebaliknya, bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa (Widayati & Abdurahim, 2022). Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang membuktikan bahwa sistem pengendalian internal tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (Purba, dkk., 2021).

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dijabarkan, maka penulis tertarik untuk mereplikasi dan mengembangkan penelitian dari Ridzal, dkk. 2022 guna menganalisis lebih lanjut pengaruh ketiga unsur tersebut yakni kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal sebagai variabel independen terhadap kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen. Dari uraian di atas juga terdapat gap penelitian antara penelitian terdahulu yang menjelaskan 3 variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen, sedangkan beberapa penelitian lainnya menjelaskan variabel independen tidak berpengaruh pada variabel dependen yang menyebabkan inkonsistensi.

Peneliti sebelumnya juga menyarankan untuk menambahkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Maka penulis menambahkan satu variabel independen yakni tingkat pemahaman akuntansi. alasan tingkat pemahaman akuntansi ditambahkan sebagai variabel independen dikarenakan beberapa hasil studi memaparkan bahwa pemahaman akuntansi

adalah tolak ukur pemahaman seseorang mengenai akuntansi, mulai dengan mencatat transaksi sampai menyusun dan menyediakan informasi yang akurat mengenai keuangan, yang akan memastikan apakah mereka dapat memahami dan menerapkan pengetahuan yang dimiliki dengan baik atau tidak (Artiwi & Kresnandra, 2023). Sehingga timbul asumsi bahwa untuk menghasilkan laporan keuangan dibutuhkan pemahaman akuntansi.

Terdapat beberapa penelitian yang menyatakan bahwa dibutuhkan tingkat pemahaman akuntansi yang tinggi untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas (Rahmawati & Putri, 2022). Hal tersebut sejalan dengan hasil studi yang nyatakan tingkat pemahaman akuntansi memiliki pengaruh positif pada kualitas laporan keuangan (Bhegawati & Novarini, 2021). Menurut penelitian lain, kualitas laporan keuangan dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pengetahuan akuntansi dan penggunaan sistem informasi keuangan daerah (Yenni, dkk., 2020).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian adalah:

1. Apakah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan?

4. Apakah tingkat pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji hubungan positif antara kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk menguji hubungan positif antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Untuk menguji hubungan positif antara sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
4. Untuk menguji hubungan positif antara tingkat pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu akuntansi khususnya dalam bidang akuntansi manajemen dengan menggunakan teori *stewardship*, dimana pemerintah daerah sebagai *steward* yang mendahulukan kepentingan organisasi tahu dan paham terhadap pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem

pengendalian internal dan tingkat pemahaman akuntansi untuk menghasilkan kualitas Laporan keuangan yang baik untuk para *stakeholder* atau *principal*.

1.4.2 Manfaat praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo

Menambah pemahaman tentang pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal dan tingkat pemahaman akuntansi terhadap kualitas Laporan keuangan, untuk bisa memaksimalkan faktor tersebut dan menghasilkan Laporan keuangan yang berkualitas lebih baik.

2. Bagi Pemerintah

Dapat mengevaluasi dan meningkatkan kinerja serta membantu pemerintah dalam meningkatkan tata kelola keuangan publik yang baik dan efektif. Sehingga dengan begitu informasi yang diperoleh masyarakat dapat dipertanggung jawabkan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah meningkat.